

## DAMPAK PEMBANGUNAN IKN NUSANTARA: MENJADI SOLUSI PEMERATAAN PEREKONOMIAN ATAU TIMBUL PERMASALAHAN LINGKUNGAN?

M. Hibatulloh Al Habib<sup>1</sup>, Ahmad Dairobbi<sup>2</sup>, Raihan Adam Zoya<sup>3</sup>,  
Raizky Rienaldy Pramasha<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Email: [ahmddairobbi27@gmail.com](mailto:ahmddairobbi27@gmail.com)\*

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Pemindahan ibu kota merupakan isu yang sangat krusial dan menimbulkan berbagai tanggapan di tengah masyarakat. Pemindahan ibu kota juga bukanlah suatu hal yang mudah karena harus melalui berbagai proses, perencanaan dan anggaran serta dilandaskan dengan tujuan dan alasan yang jelas dan semata-mata mendukung kesejahteraan masyarakat. Semakin bertambahnya populasi penduduk maka permintaan akan suatu alat pemenuh kebutuhan kian meningkat. Sebagai contoh peralihan lahan suatu kawasan hutan menjadi lahan pakai, seperti lahan pertanian, perkebunan, hunian dan lain sebagainya.. Tindakan ini biasa disebut dengan deforestasi/degradasi lahan. Deforestasi/degradasi lahan merupakan peralihan fungsi lahan menjadi lahan pakai, sebagai salah satu contoh yaitu pembangunan IKN Nusantara yang bertempat di provinsi Kalimantan Timur. IKN Nusantara adalah Ibukota baru negara Republik Indonesia per Juni 2024, yang sebelumnya Ibukota negara Republik Indonesia adalah DKI Jakarta. IKN Nusantara dibangun dengan maksud sebagai Ibukota yang nantinya sebagai pusat pendistribusian perekonomian Indonesia secara merata. Konsep pembangunan IKN Nusantara mengdopsi konsep kota berwawasan lingkungan berkelanjutan. Namun, hal ini menimbulkan pro-kontra, dikarenakan lahan yang digunakan dalam pembangunannya adalah lahan hutan. Permasalahan yang timbul adalah apakah pembangunan IKN Nusantara membantu pemerataan perekonomian di Indonesia atau menimbulkan permasalahan baru bagi lingkungan. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode kualitatif yang disajikan dengan analisis deskriptif. Hasil pada penelitian ini adalah 50/50 yaitu pembangunan IKN Nusantara memiliki dampak positif bagi pemerataan ekonomi dan dikhawatirkan menimbulkan permasalahan lingkungan.</i></p>	<p>Diajukan: 20-3-2024 Diterima: 21-5-2024 Diterbitkan : 25-05-2024</p> <p><b>Kata kunci:</b> <i>IKN Nusantara, Pemerataan Ekonomi, Permasalahan Lingkungan.</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>East Lampung Region, Natural Resources Economics, Sustainability</i></p>
<p><b>Abstract</b></p> <p><i>The relocation of the capital city is a very crucial issue and has raised various responses in society. The relocation of the capital city is also not an easy thing because it must go through various processes, planning and budgeting and is based on clear goals and reasons and solely supports the welfare of the community. The increasing population means that the demand for a means of fulfilling needs is increasing. For example, the conversion of a forest area into land for use, such as agricultural land, plantations, housing and so on. This action is commonly referred to as deforestation/land degradation. Deforestation/land degradation is the conversion of land function into land for use, as one example is the development of the IKN Nusantara which is located in the province of East Kalimantan. IKN</i></p>	

*Nusantara is the new capital city of the Republic of Indonesia as of June 2024, previously the capital city of the Republic of Indonesia was DKI Jakarta. IKN Nusantara was built with the intention of being the capital city which would later be the center for the distribution of the Indonesian economy evenly. The concept of developing IKN Nusantara adopts the concept of a sustainable environmentally friendly city. However, this has caused pros and cons, because the land used in its development is forest land. The problem that arises is whether the development of IKN Nusantara helps to equalize the economy in Indonesia or creates new problems for the environment? The research in this journal uses a qualitative method presented with descriptive analysis. The results of this study are 50/50, namely the development of IKN Nusantara has a positive impact on economic equality and is feared to cause environmental problems.*

**Cara mensitasi artikel:**

Habib, M.H.A., Dairobbi, A., Zoya, R.A., & Pramasha, R.R. (2024). Dampak Pembangunan IKN Nusantara: Menjadi Solusi Pemerataan Perekonomian Atau Timbul Permasalahan Lingkungan. *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 2(2), 405-411. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN>

## PENDAHULUAN

Ibu kota adalah tempat kedudukan pemerintahan suatu negara yang menjadi pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpunnya unsur administratif yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ibu kota menjadi simbol kekuasaan dari suatu negara. Berbicara mengenai ibu kota suatu negara, di Indonesia sendiri memiliki ibu kota negara yang berada di Jakarta. DKI Jakarta menjadi Ibu kota melalui perjalanan historis yang begitu panjang sejak zaman Hindia-Belanda.

DKI Jakarta telah mengambil banyak peran penting dalam proses pemerintahan di Indonesia. Saat ini, Ibu kota negara Indonesia telah dipindahkan ke IKN Nusantara bertepatan di provinsi Kalimantan Timur. Pindahan ibu kota telah direncanakan sejak masa kepresidenan yaitu Ir. Soekarno, dikarenakan kondisi politik yang memanas pada era orde lama pasca kemerdekaan Republik Indonesia.

Pemindahan Ibu kota negara, pada akhirnya dapat terwujud pada masa kepresidenan Ir. Joko Widodo, dikarenakan kondisi DKI Jakarta yang sudah tidak memungkinkan untuk menjadi ibu kota lagi dengan berbagai permasalahan lingkungan. Pembangunan IKN Nusantara dengan konsep kota hutan yang mengadopsi konsep pembangunan lingkungan berkelanjutan.

Tidak hanya itu, pembangunan IKN Nusantara juga bertujuan dalam pemerataan perekonomian dan harapannya tidak tersentralisasi hanya di Pulau Jawa dan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan di tengah masyarakat Indonesia.

Pembangunan IKN Nusantara juga tidak terlepas dengan kegiatan peralihan lahan menjadi lahan guna, yang biasa dikenal dengan deforestasi. Deforestasi adalah proses penghilangan hutan dengan cara penebangan dengan tujuan mengambil hasil hutan atau mengubah fungsi hutan menjadi fungsi non-hutan.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan analisis deskriptif yang menganalisis dan mengumpulkan data dan artikel terdahulu yang relevan dengan pembahasan topik IKN Nusantara sebagai ikon Ibu kota negara yang baru dengan tujuan pemerataan ekonomi dan konsep pembangunan kota berwawasan lingkungan berkelanjutan. Teknik pengambilan dan pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi, yang artinya data diperoleh dengan mengumpulkan artikel ataupun jurnal penelitian terlebih dahulu dengan relevansi terhadap penelitian ini. Pada penelitian ini juga dipaparkan visual gambar dengan tujuan untuk mendukung penjabaran pada penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

IKN Nusantara adalah Ibu Kota masa depan Indonesia yang terletak di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. IKN singkatan dari Ibu Kota Negara, singkatan tersebut digunakan untuk mempersingkat dan mempermudah penyebutan Ibu Kota baru. Selain itu, istilah IKN juga digunakan mulai dari proses perencanaan, pembangunan hingga penciptaan Rancangan Undang-Undang mengenai IKN sebagai landasan hukum dalam proses perwujudannya.

IKN Nusantara berdiri di lahan seluas 56.159 hektare sebagai kawasan Ibu Kota dan 196.501 hektare sebagai kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara. Dalam pembangunan IKN Nusantara dilandasi dengan UU. No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Konsep pembangunan IKN juga mengadopsi konsep Smart City yang bermaksud mengadopsi konsep pembangunan kota masa depan yang berwawasan lingkungan berkelanjutan dan sebagai kapitalis atau pusat pemerataan perekonomian dan mobilitas pembangunan nusantara.

### Dampak Perekonomian dalam Pemandahan dan Pembangunan IKN Nusantara



Gambar 1. IKN Nusantara, Istana Garuda  
Sumber: voi.id

Pembangunan IKN Nusantara sendiri memiliki berbagai tujuan, salah satunya dalam rangka pemerataan perekonomian Indonesia. Indonesia sendiri memiliki permasalahan perekonomian, yaitu terjadi ketimpangan perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau luar Jawa. Keberlangsungan dalam pemindahan IKN Nusantara akan menjadi suatu permasalahan seperti urbanisasi. Kegiatan industri, perusahaan, bahkan masyarakat akan bermigrasi ke IKN Nusantara.

Dalam kajian Bappenas, menerangkan bahwa pemindahan IKN akan berdampak positif bagi perekonomian nasional, dengan perkiraan capaian PDRB nasional sebesar 0,1%.

Kenaikan PDRB ini diakibatkan adanya pemanfaatan sumber daya yang berpotensi seperti pembukaan lahan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di IKN dan terciptanya lapangan pekerjaan bagi sumber daya manusia yang kompeten dan belum dimanfaatkan.

Di Indonesia, 54,54% kegiatan perekonomian terpusat di Pulau Jawa. Maka dari itu, perlu dilaksanakannya pemindahan ibu kota negara demi tercapainya pemerataan ekonomi di Indonesia yang diposisikan di provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur dinilai dapat menjadi lokasi strategis dalam rangka distribusi atau pemerataan ekonomi di Indonesia dengan melakukan pengembangan perdagangan atau mempermudah mobilitas antar daerah (Kristianto, 2022).

Di sisi lain, dalam pembangunan IKN Nusantara juga diperlukan adanya anggaran pembiayaan yang begitu besar. Pembangunan IKN Nusantara juga membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang masif dan biasanya dalam proses pembangunan akan terjadi pembengkakan biaya atau biaya di luar perkiraan awal dikarenakan berbagai hal seperti kenaikan harga bahan baku pembangunan dan sebagainya.

### **Dampak Lingkungan terhadap Pembangunan IKN Nusantara**



**Gambar 2 Proses Pembangunan IKN**  
Sumber: koran.tempo.co

Pembangunan IKN Nusantara mengadopsi konsep pembangunan kota dengan berwawasan lingkungan berkelanjutan. Pemindahan Ibu kota Indonesia bukan hanya sekedar wacana, namun menjadi agenda yang serius yang ditandai dengan terbitnya UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang ditandatangani dan diresmikan pada 15 Februari 2022.

Dalam Undang-Undang tersebut, mengatur tentang pembangunan IKN Nusantara, pembentukan otoritas setara dengan kementerian yang bertujuan dalam fokus pembangunan IKN Nusantara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara, serta titik lokasi yang menjadi pusat pembangunan IKN Nusantara secara tepat agar tidak merusak keanekaragaman hayati hutan Borneo.

Adapun pembagian wilayah dalam proses pembangunan IKN Nusantara yaitu 75% area hijau dengan 65% area yang diproteksi dan 10% area pangan. Sehingga, pembagian wilayah ini diharapkan menjadi kota yang terbuka, inklusif serta ramah lingkungan dan seluruh sumber daya dapat hidup berdampingan. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf B UU RI No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa

penataan ruang harus memastikan kelestarian lingkungan dan tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap perubahan lingkungan.

Konsep Forest City yang diusung dalam pembangunan IKN Nusantara, yaitu bermakna pembangunan kota/bangunan yang ditutupi dengan pepohonan atau tumbuhan. Dalam pembangunan IKN Nusantara, konsep Forest City mengarah pada mempertahankan atau menjaga fungsi ekologis hutan yaitu sebagai ekosistem atau rumah bagi semua makhluk hidup dan keberlangsungan atau berkelanjutan ekosistem.

Melihat dari segala konsep yang disajikan dalam pembangunan IKN Nusantara, namun terdapat dampak lingkungan yang telah diperkirakan, yaitu:

1. Degradasi kawasan hutan

Hal ini menjadi tantangan dalam mewujudkan IKN Nusantara sebagai ibu kota baru, padahal kawasan hutan daerah Kalimantan Timur menjadi kawasan hutan konservasi. Degradasi hutan dapat dilihat dari menurunnya tutupan hutan yang disebabkan pengalihan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menjadi area hunia, lahan pangan, atau kegiatan nonperhutanan lainnya.

2. Potensi Emisi Karbon

Dalam pembangunan IKN Nusantara, dibutuhkan pembukaan lahan baru dalam proses pembangunannya. Hal tersebut berpeluang dalam menciptakan emisi dengan total 2,4 juta ton CO<sub>2</sub>Ekuivalen, yang berasal dari hutan sekunder dan 29 ribu ton CO<sub>2</sub>Ekuivalen dan hutan tanaman 154 ribu ton CO<sub>2</sub>Ekuivalen dari pembukaan lahan seluas 56 ribu Ha (hektar).

3. Ancaman bagi Habitat Satwa

Hutan Kalimantan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati, flora dan fauna. Pembangunan IKN Nusantara akan menjadi ancaman bagi satwa dan spesies tanaman akibat degradasi kawasan hutan.

4. Keterbatasan atas ketersediaan air bersih

Ketersediaan air di kawasan IKN Nusantara tergolong rendah dikarenakan terletak pada kawasan non-CAT (Cekungan Air Tanah).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pemindahan Ibu kota menjadi salah satu isu yang krusial yang menimbulkan berbagai IKN Nusantara. Pemindahan Ibu Kota, telah direncanakan sejak lama. Pemindahan IKN ke IKN Nusantara provinsi Kalimantan Timur terealisasi dan sudah direncanakan sejak tahun 2019 era kepresidenan Ir. Joko Widodo. Pemindahan Ibu Kota dikarenakan berbagai tujuan, alasan dan pertimbangan. Salah satunya adalah mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia atau dalam rangka pemerataan ekonomi di Indonesia. Dengan pemindahan Ibu kota, diharapkan dapat menjadi sarana sebagai pemerataan ekonomi di Indonesia dan tidak fokus pada suatu daerah tertentu.

Dalam pembangunan IKN Nusantara diatur dalam UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang menjadi landasan dalam pembangunan IKN Nusantara. IKN Nusantara memiliki prioritas sebagai kota masa depan dengan konsep forest city (kota hutan) untuk terciptanya keseimbangan ekosistem. Di sisi lain, adapun isu terkait pembangunan IKN Nusantara dikhawatirkan menimbulkan dampak terhadap lingkungan meskipun terdapat konsep smart city yang mengedepankan konsep pembangunan

berwawasan lingkungan berkelanjutan, di antaranya adalah degradasi/deforestasi kawasan hutan, potensi limbah atau emisi karbon, ancaman terhadap keberlangsungan habitat keanekaragaman hayati dan keterbatasan ketersediaan air bersih.

Adapun beberapa saran terkait dengan pembangunan IKN Nusantara yaitu:

1. Memperkuat dan menggunakan UU berlaku dalam proses pembangunan IKN Nusantara sebagai landasan hukum dan dalam rangka menghindari kesewenangan pihak atau kesalahan eksekusi pembangunan.
2. Dalam aspek ekonomi, negara harus memiliki peranan dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tidak terpusat dalam suatu daerah tertentu.
3. Menerapkan betul terhadap konsep Forest City sebagai konsep yang telah dicanangkan pada tahap perencanaan awal pembangunan IKN Nusantara agar terciptanya Ibu Kota sebagai kota kapitalis masa depan yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.
4. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan seperti pengelolaan sampah, transportasi berkelanjutan dan layanan publik yang ramah lingkungan.
5. Meningkatkan prioritas terkait dengan indeks pembangunan manusia melalui pendidikan agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Amila, Siti, et al. "Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2023): 10-18.
- Armansyah, Roy, Muhamad Auza Syam, and Nabila Azahra. "Peran Ibu Kota Nusantara Sebagai Kota Sustainable Cities Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2.1 (2024): 255-266.
- Hasibuan, Reni Ria Armayani, and Siti Aisa. "Dampak dan resiko perpindahan ibu kota terhadap ekonomi di indonesia." *ATTAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5.1 (2020): 183-203.
- Herdiana, Dian. "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Transformativ* 8.1 (2022): 1-30.
- Irmawan, Iwan, Fildza Amari Sagharmata, and Fransisca Ruthriana. "Analisis Dampak Pembangunan Kota Hutan (Forest City)(Studi Kasus: Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan)." *Prosiding Seminar Rekayasa Teknologi (SemResTek)*. 2023.
- Kristianto, A. (2022). *Perpindahan Ibu Kota Ber dampak Positif Terhadap Ekonomi Nasional*. <https://kumparan.com/tulisanqu19/perpindahan-ibu-kota-berdampakpositif-terhadap-ekonomi-nasional-1xLt8Q3DfjB/full>
- Mulyaningrum, Retno. "Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN Dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan." *Perspektif Hukum* (2023): 82-105.
- Silalahi, Sahat Aditua Fandhitya. "Dampak ekonomi dan risiko pemindahan ibu kota negara." *Info Singkat* 11.16 (2019): 19-24.
- Simanjuntak, Johana Veronika, et al. "Potensi Ibu Kota Nusantara (IKN) Sebagai Katalisator Pemerataan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnalku* 4.3 (2024): 275-290.

Tasya, Najwa. "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1.2 (2024): 122-132.

Wahyu, Arfiga, and Aldri Frinaldi. "Analisa Dampak Lingkungan Ibu Kota Nusantara." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | EISSN: 3031-8882 1.2 (2024): 29-33.